



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
UNIT KERJA : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BENGKULU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DWI YOGO SUPRIYANTO
2. Jabatan : KEPALA
3. NHK : 923681

II. DATA HARTA

- A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 980.000.000**
1. Tanah Seluas 1.094 m2 di KAB / KOTA KOTA BENGKULU , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah Seluas 50.000 m2 di KAB / KOTA BENGKULU UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA BENGKULU , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 136 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA BENGKULU , HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
- B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 61.000.000**
1. MOBIL, TOYOTA AGYA Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
2. MOTOR, YAMAHA VEGA R Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
3. MOTOR, HONDA REVO Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
4. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
- C. HARTA BERGERAK LAINNYA** **Rp. 40.000.000**
- D. SURAT BERHARGA** **Rp. ---**
- E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp. 428.127.114**



F. HARTA LAINNYA

Rp. 28.000.000

Sub Total

Rp. 1.537.127.114

III. HUTANG

Rp. 28.622.400

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.508.504.714

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.